



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat
Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea Pada Era
Kepemimpinan Obama Tahun 2014

Skripsi

Oleh

Erviana Giovana Erwandi

2015330125

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat
Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea Pada Era
Kepemimpinan Obama Tahun 2014

Skripsi

Oleh

Erviana Giovana Erwandi

2015330125

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira

Bandung

2019



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Erviana Giovana Erwandi
Nomor Pokok : 2015330125
Judul : Analisis Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat
Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea Pada Era
Kepemimpinan Obama Tahun 2014

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 30 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. : _____

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira : _____

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erviana Giovana Erwandi
NPM : 2015330009
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Analisis Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea Pada Era Kepemimpinan Obama Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa segala konten dalam skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab, maka dari itu saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Agustus 2019

Erviana Giovana Erwandi

ABSTRAK

Nama : Erviana Giovana Erwandi
NPM : 2015330125
Judul : Analisa Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap
Rusia Atas Aneksasi Krimea Pada Era Kepemimpinan Obama
Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat menerapkan kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Rusia dalam merespon aneksasi Krimea oleh Rusia. Kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat kemudian dianalisis menggunakan teori *Neo Classical Realism*, yang melihat adanya determinan domestik dan eksternal dalam melahirkan sebuah kebijakan.

Dengan menggunakan kerangka tersebut dapat diketahui kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat didorong oleh ideologi politik Amerika Serikat, preferensi elit dan persepsi ancaman, opini publik Amerika Serikat, serta kekuatan material relatif Amerika Serikat berupa kekuatan ekonomi Amerika Serikat.

Kata Kunci: realisme neoklasik, aneksasi Krimea, kebijakan luar negeri Amerika Serikat

ABSTRACT

Name : *Erviana Giovana Erwandi*

NPM : *2015330125*

Title : *Foreign Policy Analysis of US Economic Sanctions Against Russia in Response to Crimean Annexation in the Obama Administration Era 2014*

This research aims to discuss the factors underlying the US foreign policy of economic sanctions to Russia in response to the annexation of Crimea by Russia. The United States economic sanction was then analyzed by Classical Neo Realism, which analyzes domestic and external determinants in policy making.

The United States economic sanctions policy is motivated by US political ideology, Barack Obama's policies and characteristics, elite preferences and perceived threats, US public opinion, and the relative material power of the United States.

Keywords: neoclassical realism, annexation of Crimea, United States foreign policy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisa Kebijakan Luar Negeri Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Rusia dalam menanggapi Aneksasi Krimea Di Era Pemerintahan Obama Tahun 2014”. Penulisan skripsi ini disusun untuk dijadikan tugas akhir di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. I Nyoman Sudira selaku pembimbing atas segala arahan serta nasehat beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini serta membuka diri terhadap kritik dan masukan yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini.

Bandung, 16 Juli 2019

Erviana Giovana Erwandi

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada :

1. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT
 2. Mas Dr. I Nyoman Sudira. yang telah menjadi pembimbing skripsi saya
 3. Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. dan Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si selaku penguji siding skripsi saya
 4. Kedua orang tua saya Dr. Erwandi dan Gliceria Budiani Rutiningsih yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini
 5. Kakak saya Erdiani Marcelini Erwandi dan adik saya Erasmo Aikako Erwnadi
 6. Sahabat-sahabat saya Alexander Larasati, Rachel Melissa, Christy Angelia, Devira Sharvensya yang selalu mendukung saya dan menyemangati saya dalam dunia perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi ini
 7. Temanku Ferdinan yang selalu setia memberikan dukungan moral dan semangat
- , dan teman-teman saya diluar sana yang saya tidak dapat dituliskan satu persatu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.2.3 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Tinjauan Pustaka	12
1.5 Kerangka Pemikiran	14

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	25
KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM KRISIS KRIMEA.....	25
2.1 Sejarah Krisis Krimea	25
2.1.1 Disintegrasi Internal dalam Ukraina	25
2.1.2 Aneksasi Krimea oleh Rusia	34
2.2 Aktor-aktor dalam Krisis Krimea.....	37
2.2.1 Rusia.....	37
2.2.2 Uni Eropa	39
2.2.3 Amerika Serikat	41
2.3 Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Krimea.....	42
2.3.1 Kepentingan Politik.....	44
2.3.2 Kepentingan Ekonomi.....	47
2.3.4 Kepentingan Militer	48
2.4 Tindakan Amerika Serikat dalam Menanggapi Aneksasi Krimea oleh Rusia	49
BAB III	52
KEBIJAKAN SANKSI EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUSIA TERKAIT ANEKSASI KRIMEA	52

3.1 Determinan Domestik dalam <i>Neo Classical Realism</i>	54
3.1.1 Ideologi Politik Amerika Serikat	58
3.1.2 Preferensi Elit dan Persepsi Ancaman	60
3.1.3 Opini Publik Amerika Serikat	64
3.1.4 Kekuatan Material Relatif	67
3.2 Determinan Eksternal / Internasional dalam <i>Neo-Classical Realism</i>	72
3.3 Outcome dari Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Aneksasi Krimea oleh Rusia.....	76
BAB IV	81
KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR SINGKATAN

OEF	<i>Operation Enduring Freedom</i>
NSS	<i>National Security Strategy</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
WMD	<i>Weapons of Mass Destruction</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
CENTCOM	<i>U.S Central Command</i>
ASF	<i>Army Special Forces</i>
SOF	<i>Special Operation Forces</i>
CJTF	<i>Common Joint Task Force</i>
CFLCC	<i>Coalition Forces Land Component Command</i>
ACM	<i>Anti-Coalition Militants</i>
NavSOF	<i>Navy Special Operations Force</i>
U.S Navy SEAL	<i>The United States Navy Sea, Air and Land</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembagian wewenang Kebijakan Luar Negeri.....	56
Tabel 3.2 Hubungan Ekspor Impor AS – Rusia.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Map Jembatan Penghubung yang Menyalurkan Gas dari Rusia ke Eropa.....	38
Gambar 3.1 Opini Publik AS Mengenai Kebijakan Sanksi Ekonomi AS Terhadap Rusia.....	65
Gambar 3.2 Opini Publik AS Mengenai Intensitas Sanksi Ekonomi AS Terhadap Rusia.....	66
Gambar 3.3 Daftar 10 Negara dengan GDP tertinggi.....	69
Gambar 3.4 Hubungan Ekonomi AS – Rusia.....	70
Gambar 3.5 Tren Ekonomi Rusia Setelah Sanksi Ekonomi.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Februari 2014 lalu, Rusia melakukan tindakan yang telah menggemparkan dunia internasional, yaitu melakukan tindakan pencaplokan atau aneksasi sepihak terhadap Krimea. Aksi aneksasi yang dilakukan Rusia di semenanjung Krimea, wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol, berawal dari adanya gerakan Euromaidan atau “*Eurosquare*”, dimana gerakan Euromaidan ini merupakan gelombang demonstrasi di Ukraina pada 21 November 2013 yang menginginkan Ukraina melakukan integrasi dengan Eropa.¹ Tindakan protes tersebut meluas menjadi seruan untuk memberhentikan presiden yang menjabat saat itu, yakni Presiden Viktor Yanukovych beserta pemerintahannya yang pro Rusia. Aksi protes juga memfokuskan pada isu ideologi dan geopolitik yang membagi negara ke dalam dua bagian, yakni “Barat vs Rusia” yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa melawan Rusia.² Puncak aksi protes ini terjadi pada pertengahan Februari 2014 ketika aparat kepolisian merespon aksi protes para demonstran yang pro Barat, yang menginginkan adanya integrasi Ukraina dengan Eropa, dengan cara

¹ Andrew Wilson. *Ukraine Crisis : What It Means For The West* (Hampshire : Yale University Press, 2014), hal. 66-97

² Serhy Yekelchuk. *The Conflict in Ukraine : What Everyone Needs to Know* (New York : Oxford University Press, 2015), hal. 8-10

konfrontatif yang justru membuat gelombang protes semakin besar. Akibatnya, parlemen Ukraina kemudian memberhentikan Yanukovich dan menunjuk presiden sementara, Arseniy Yatsenyuk dan membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan baru itu mendapatkan pengakuan dari PBB dan Uni Eropa. Akan tetapi, hal ini ditentang oleh pihak Rusia. Rusia memandang pemerintahan Presiden Yatsenyuk sebagai pemerintahan yang ilegal dan merupakan bentuk kudeta. Rusia bahkan memandang Amerika Serikat dan Uni Eropa turut campur tangan dalam mendanai dan mengarahkan “revolusi Ukraina” dengan pihak oposisi yang pro Barat, dimana Rusia menilai bahwa pihak oposisi tersebut selama bertahun-tahun menerima dukungan dan bantuan keuangan serta politik dari Amerika Serikat serta Uni Eropa. Rusia juga memandang bahwa pemberhentian Presiden Yanukovich bersifat ilegal dan tetap menganggap Yanukovich sebagai presiden Ukraina. Rusia pun kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Ukraina. Intervensi militer Rusia di Ukraina meliputi serangkaian konflik bersenjata yang berujung pada pendudukan berbagai wilayah Ukraina termasuk Krimea.³

Pasukan pro Rusia pun kemudian mulai menguasai semenanjung Krimea. Banyak yang mempercayai bahwa pasukan tersebut merupakan personel militer Rusia. Pada saat pasukan bersenjata tersebut menguasai gedung parlemen Krimea, anggota parlemen Krimea melakukan

³ Andrew Wilson. *Ukraine Crisis : What It Means For The West* (Hampshire : Yale University Press, 2014), hal. 66-97

pemungutan suara untuk memberhentikan pemerintahan Krimea, yang kemudian dilanjutkan dengan mengganti perdana menteri dan menyerukan referendum mengenai otonomi Krimea. Tak lama kemudian, pada 16 Maret 2014, dilaksanakan referendum mengenai sikap politik Krimea untuk bergabung dengan pemerintah Federasi Rusia dengan perolehan suara 96,77% (Krimea) dan 95,6% (Sevastopol). Referendum ini ditentang oleh Uni Eropa, AS, Ukraina dan warga Krimea karena dipandang bertentangan dengan hukum internasional. Parlemen Krimea mendeklarasikan kemerdekaan Krimea dan lepas dari Ukraina serta memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Meskipun referendum ini mendapatkan kecaman dari Uni Eropa, AS, dan dunia, Rusia dan Krimea tetap menandatangani perjanjian penggabungan Republik Krimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Pada April 2014, parlemen Ukraina mendeklarasikan Krimea sebagai wilayah yang sementara ini dianeksasi Rusia. Untuk mengatasi kekisruhan dan kekacauan politik, pada 25 Mei 2014, pemilu presiden digelar di Ukraina yang akhirnya dimenangkan oleh Petro Poroshenko, mengalahkan mantan PM Yulia Tymoshenko.⁴

Intervensi Rusia di Ukraina berupa aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea untuk mempertahankan kekuatan dan kepentingan Rusia di wilayah Krimea, pun mendapatkan respon negatif dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap Rusia bermaksud memecah belah wilayah Krimea,

⁴ Indriana Kartini. "Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina" *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, Hlm. 27-41, diakses pada 11 Februari 2019. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/download/35/33>

yang mana merupakan bekas wilayah Uni Soviet tersebut. Intervensi Rusia dalam masalah Ukraina yang melakukan aneksasi secara sepihak pun dinilai tidak sesuai dengan norma-norma internasional dan melanggar hukum internasional. Aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea berujung pada tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan salah satu instrumen *power* di bidang ekonomi berupa kebijakan sanksi ekonomi kepada Rusia. Sanksi ekonomi tersebut berupa pembekuan aset Rusia di Amerika, dan larangan pemberian visa bagi pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam intervensi militer Rusia di Krimea.⁵ Hal ini menjadi menarik bagi penulis atas tindakan Amerika Serikat yang lebih memilih memberlakukan kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi dibandingkan kebijakan militer itu sendiri, mengingat Amerika Serikat memiliki *power* atau kekuatan di bidang militer ditunjukkan dengan posisi Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dalam hal kekuatan militer di dunia, yang tentu semakin menekankan besarnya kapabilitas Amerika Serikat untuk melakukan kebijakan berupa intervensi militer di Ukraina. Sehingga dalam kasus aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia, Amerika Serikat memiliki pilihan untuk menggunakan kekuatannya untuk menandingi tindakan Rusia di Ukraina dan membatalkan aneksasi tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga dapat melakukan *deterrence* kepada Rusia dengan menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

⁵ Andrew Wilson. *Ukraine Crisis : What It Means For The West* (Hampshire : Yale University Press, 2014), hal. 183-204

Tindakan ini dapat memberikan tekanan kepada Rusia sehingga akan lebih mudah untuk melakukan negosiasi mengenai pengembalian semenanjung Krimea menjadi wilayah Ukraina lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang memfokuskan pada determinan domestik Amerika Serikat serta determinan eksternal yang mendorong Amerika Serikat memberlakukan kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Rusia. Peneliti memandang bahwa pertarungan dan perebutan kekuasaan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Eropa Timur terkait konflik Krimea di Ukraina serta tindakan Amerika Serikat yang lebih memilih kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi menarik untuk diteliti. Meskipun hubungan Amerika Serikat dengan Rusia menjadi poros sentral dari hubungan internasional kontemporer, perebutan kekuasaan geopolitik antara Rusia dan Amerika Serikat, yang dimulai pada tahun 2014, menjadi faktor yang menentukan bagi tatanan atau sistem internasional yang ada. Perebutan kekuasaan geopolitik ini disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih dalam daripada sekadar benturan kepentingan nasional antara Amerika Serikat dan Rusia di Ukraina, yakni keretakan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara *great power* sebagai akibat dari tatanan internasional yang bersifat multipolar, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan baru. Perebutan kekuasaan geopolitik di Krimea, Ukraina juga mencerminkan keengganan Rusia untuk menerima kepemimpinan global Amerika Serikat dan upaya

Amerika Serikat untuk memulihkan *power* atau kekuatan hegemoninya di setiap kawasan. Karena tidak adanya kompromi dari kedua pihak dalam menyelesaikan konflik Krimea dan keduanya berfokus pada usaha saling membendung atau menghalangi pengaruh kekuatan lawan, perebutan kekuasaan geopolitik Amerika Serikat - Rusia akan semakin memperdalam perpecahan di Atlantik dan Pasifik, yang semakin menyebabkan intensifnya kesenjangan global menjadi dua komunitas politik dan ekonomi utama.⁶

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Semenanjung Krimea merupakan wilayah Rusia yang menjadi pangkalan armada Laut Hitam sejak abad ke-18 yang dipimpin oleh pemimpin Uni Soviet pada waktu itu, yakni Presiden Nikita Krushev. Pada saat itu, Presiden Nikita Krushev memberikan Krimea kepada Ukraina sebagai hadiah pada tahun 1954. Sejak saat itu terjadi ketegangan etnis di Krimea karena besarnya etnis Rusia di Ukraina serta adanya kedekatan secara historis dan budaya yang terjalin dengan Rusia. Sehingga menyebabkan perpecahan antara masyarakat di Ukraina, dimana sebagian masyarakat menilai Krimea memiliki keterkaitan lebih dengan Ukraina berdasarkan geografi, budaya, dan etnisitas, dan masyarakat yang memiliki orientasi pro Rusia. Perpecahan ini semakin diperparah dengan adanya krisis Krimea yang

⁶ Serhy Yekelchuk. *The Conflict in Ukraine : What Everyone Needs to Know* (New York : Oxford University Press, 2015), hal. 153-165

dimulai sejak November 2013 dimana pada saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych batal melakukan kesepakatan atau perjanjian dagang yang dinamakan *European Association Agreement* dengan Uni Eropa. Tidak hanya itu, Presiden Yanukovych bahkan memutuskan untuk menerima utang dari Rusia sebanyak 15 miliar dolar AS sebagai bentuk kompensasi karena Ukraina batal melakukan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Akibat dari batalnya perjanjian atau kesepakatan dagang tersebut, masyarakat wilayah Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, menginginkan agar Ukraina mendekatkan diri dan melakukan integrasi dengan Eropa Barat. Hal ini mendapatkan tentangan dari kubu yang pro Rusia, yang kemudian menggelar demonstrasi. Rusia pun tidak kalah dengan pihak Barat dan hendak membentuk pakta ekonomi saingan dari Uni Eropa, sehingga melakukan pendekatan dengan Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan wilayah yang penting sebab Ukraina merupakan negara terbesar di kelompok Eurasia. Ukraina sendiri membutuhkan pasokan gas dari Rusia. Oleh karena itu, sejak November 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan melakukan intervensi militer dengan mengirimkan pasukan militernya sebanyak 16.000 tentara ke Semenanjung Krimea. Pasukan militer ini telah menguasai semua pusat pemerintahan Ukraina dan juga gedung parlemen sehingga membuat militer Ukraina tidak mampu bergerak sedikit pun. Rusia mengirimkan pasukan ke Semenanjung Krimea karena wilayah ini memiliki mayoritas penduduk dengan etnis Rusia, yakni sebanyak 58,5 persen. Oleh karena kedekatan secara etnis dan juga historis serta budaya, pemerintah otoritas

Krimea tengah mempersiapkan referendum sebagai salah satu rencana penggabungan dengan Rusia. Bahkan, dalam beberapa bulan setelah referendum, Pemerintah Otoritas Krimea telah siap untuk menerapkan undang-undang Rusia. Tidak hanya itu saja, Kementerian Keuangan Krimea pun telah mempersiapkan skema perpindahan mata uang dari hryvnia ke rubel. Keseluruhan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Otoritas Krimea menyatakan keseriusannya dalam mempersiapkan penggabungan dengan Rusia. Perdana Menteri Krimea Sergei Aksyonov pun menjanjikan, apabila Krimea bergabung dengan Rusia maka bahasa Ukraina tetap akan menjadi salah satu bahasa resmi wilayah itu. Perdana Menteri Aksyonov juga menjanjikan kepada para tokoh masyarakat Tatar bahwa nantinya mereka akan mendapatkan kursi menteri senior dalam pemerintahan baru di Krimea.⁷

Tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Krimea mendapatkan kecaman keras dari Barat, terutama Amerika Serikat. Pihak Barat menganggap Rusia bermaksud memecah belah bekas wilayah Uni Soviet tersebut. Intervensi Rusia dalam masalah Ukraina dinilai tidak sesuai dengan norma-norma internasional.⁸ Hubungan Rusia dan Amerika Serikat berada pada titik terendah menyusul perselisihan konflik di Ukraina, mengingat Krimea memiliki sumber daya alam yang begitu besar seperti gas alam dan menjadi pemasok gas di negara-negara Eropa, dan posisi Ukraina yang strategis dimana posisi Ukraina merupakan *buffer zone* antara

⁷ Serhy Yekelchuk. *The Conflict in Ukraine : What Everyone Needs to Know* (New York : Oxford University Press, 2015), hal. 99-117

⁸ Serhy Yekelchuk. *The Conflict in Ukraine : What Everyone Needs to Know* (New York : Oxford University Press, 2015), hal. 163-165

NATO dan Federasi Rusia sehingga menjadikan posisi negara tersebut strategis secara geopolitik untuk saling berebut pengaruh ideologis maupun teritorial. Aneksasi terhadap Krimea adalah konflik geopolitik dengan Amerika Serikat dalam memperebutkan *power* atau kekuatan dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing. Sehingga dapat dilihat Krimea sebagai arena pertarungan politik dalam merebut *power* dan kekuatan masing-masing. Karena posisi Krimea itulah, Amerika Serikat mengalami ketakutan apabila Rusia melancarkan intervensi militer yang kemudian disusul oleh adanya aneksasi Krimea, yang menjadikan Krimea dibawah pengaruh Rusia, maka dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat. Untuk tetap mempertahankan *power* dan kekuatan yang dimiliki, Amerika Serikat mempertimbangkan dengan baik tindakan apa yang tepat untuk menanggapi aneksasi Krimea tersebut.⁹ Aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea berujung pada tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan salah satu instrumen *power* di bidang ekonomi berupa kebijakan sanksi ekonomi kepada Rusia. Sanksi ekonomi tersebut berupa pembekuan aset Rusia di Amerika, dan larangan pemberian visa bagi pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam intervensi militer Rusia di Krimea. Amerika Serikat juga meminta *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa untuk mengirimkan misi pemantauan ke Ukraina.¹⁰

⁹ Serhy Yekelchuk. *The Conflict in Ukraine : What Everyone Needs to Know* (New York : Oxford University Press, 2015), hal. 163-165

¹⁰ Rebecca M. Nelson. "U.S. Sanctions and Russia's Economy." *Congressional Research Service*, February 2017. Diakses pada 9 Maret 2019. <https://fas.org/sgp/crs/row/R43895.pdf>

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam menjelaskan isu tersebut. Penulis kemudian menjabarkan secara mendetail faktor-faktor, baik faktor internal maupun eksternal, yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat dalam merespon aneksasi Krimea. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dijelaskan dalam sudut pandang *Neo Classical Realism*. Kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat pun dibatasi hanya pada era kepemimpinan Barack Obama pada tahun 2014. Pembatasan ini perlu dilakukan karena kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia pun tmasih dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu Donald Trump sehingga perlu adanya pembatasan yang hanya berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan sanksi ekonomi di era Barack Obama.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan pada bagian identifikasi masalah yakni kebijakan sanksi ekonomi dalam menanggapi ancaman Rusia dalam memperebutkan *power* di wilayah Krimea, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian terkait dengan masalah tersebut

yaitu “Mengapa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan non militer berupa sanksi ekonomi dalam menanggapi aneksasi oleh Rusia pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2014?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor baik faktor domestik maupun faktor eksternal yang melatarbelakangi Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia dalam merespon aneksasi wilayah Krimea untuk mempertahankan kepentingan nasional serta pengaruh dan kekuatan geopolitik Amerika Serikat di Ukraina.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi para pembaca dalam mengkaji kebijakan sanksi ekonomi di Amerika Serikat terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea oleh Rusia. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini menambah wawasan bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Rusia di era Obama.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian yang serupa dengan topik yang peneliti angkat. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti bertujuan untuk melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa sehingga dapat melihat perbedaan-perbedaan dalam setiap penelitian serta memperkaya bahasan peneliti. Untuk penelitian pertama peneliti menggunakan tulisan dari Vinod K. Aggarwal dan Kristi Govella yang berjudul *Russian Policy and Responses from the European Union and the United States*. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa meskipun kedua negara baik Amerika Serikat maupun Rusia telah belajar untuk bekerja sama dalam beberapa masalah khususnya pasca serangan terror 9/11, hubungan mereka dapat digambarkan penuh dengan unsur-unsur persaingan, terutama dalam memperebutkan *power* atau kekuatan, daripada kerjasama. Dukungan Amerika Serikat untuk perluasan NATO, persaingan untuk sumber daya energi di Asia Tengah dan Laut Kaspia, dan metode-metode pemberantasan terorisme di kawasan ini - di antara isu-isu lainnya - terus membuat kedua negara berselisih satu sama lain. Perluasan NATO oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan infrastrukturnya lebih dekat ke bekas perbatasan Soviet telah mendorong Rusia bersikap skeptis terhadap niat dan kemauan yang dinyatakan Amerika Serikat untuk mengembangkan kerjasama di bidang keamanan. Banyak orang di Moskow menafsirkan keputusan Amerika Serikat untuk memperluas aliansi

militernya tanpa berencana memasukkan Rusia sebagai ancaman bagi Rusia.¹¹

John J. Mearsheimer dalam *Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault The Liberal Delusions That Provoked Putin* berargumen bahwa, menurut Barat, krisis Ukraina terjadi akibat kesalahan sepenuhnya pada agresi yang dilakukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menganeksasi Krimea atas dasar keinginan lama Rusia untuk membangun kembali kekuasaan Soviet Dalam pandangan ini, penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich pada bulan Februari 2014 hanya memberikan dalih untuk keputusan Putin untuk memerintahkan pasukan Rusia untuk merebut kembali Ukraina. Tapi rupanya pandangan ini salah: Amerika Serikat dan sekutu Eropa sesungguhnya memegang tanggung jawab besar atas krisis di Ukraina. Akar masalahnya adalah perluasan NATO, elemen sentral dari strategi pertahanan yang lebih besar untuk memindahkan Ukraina keluar dari pengaruh Rusia dan mengintegrasikannya ke Barat. Pada saat yang sama, ekspansi Uni Eropa ke Ukraina yang diawali *Orange Revolution* atau Revolusi Oranye pada tahun 2004 merupakan elemen penting dalam factor yang mendorong terjadinya konflik di Ukraina. Sejak pertengahan 1990-an, para pemimpin Rusia telah dengan gigih menentang perluasan NATO dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menegaskan bahwa mereka tidak akan bertahan dan menerima tindakan Barat dalam perluasan NATO.

¹¹ Vinod K. Aggarwal dan Kristi Govella. *Responding to a Resurgent Russia : Russian Policy and Responses from the European Union and the United States*. (Berkeley : Springer, 2014.), hal. 77-102

Bagi Putin, penggulingan ilegal presiden terpilih secara demokratis dan pro-Rusia Ukraina — ia sebut "kudeta" — adalah puncaknya. Putin menanggapi dengan mengambil Krimea, sebuah semenanjung yang dikhawatirkannya akan menjadi markas angkatan laut NATO sehingga Rusia melakukan intervensi di Ukraina hingga Ukraina meninggalkan keinginan dan usahanya untuk bergabung dengan Barat.¹²

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis penelitian mengenai kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat sebagai respon terhadap aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, tentu dibutuhkan teori dan konsep sebagai kaca mata atau sudut pandang untuk menganalisis fakta-fakta di dalam suatu peristiwa yang sedang diteliti yang kemudian akan menghasilkan sebuah makna yang baru. Teori utama yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah *Neo Classical Realism Theory* yang digagas oleh Gideon Rose dalam sebuah artikel yang berjudul *Neo Classical Realism and Theories of Foreign Policy*.

Pendekatan *neo classical realism* juga sering disebut sebagai penyempurnaan dari gabungan pendekatan realisme klasik dan neo-realisme dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dikatakan demikian karena pada asumsi pertama dijelaskan bahwa tekanan struktur antarbangsa

¹² John J. Mearsheimer. "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault : The Liberal Delusions That Provoked Putin". *Ukraine Article in Foreign Affairs*. (Springer : September/October 2014), hal. 1-12, Diakses pada 20 Maret 2018

<http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/Ukraine%20Article%20in%20Foreign%20Affairs.pdf>

merupakan faktor utama yang mempengaruhi politik suatu negara seperti dalam pendekatan neo-realisme dan asumsi kedua yang menyebutkan bahwa meskipun negara merupakan aktor utama seperti pada pendekatan realisme klasik, akan tetapi faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri adalah tergantung pada persepsi pemimpin. Teori *neo classical realism* dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan keputusan politik internasional negara yang menghasilkan kebijakan luar negeri.¹³ Dengan menggunakan pendekatan realisme neoklasik, maka dapat dianalisa seperti apa faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait aneksasi terhadap Krimea yang dilakukan Rusia.

Dalam teori *Neo Classical Realism*, Gideon Rose menjelaskan bahwa tindakan suatu negara dapat dipengaruhi oleh determinan domestik atau variable internal dan determinan internasional atau variabel eksternal. Teori ini menggabungkan komponen domestik internal dan lingkungan eksternal. Neo Classical Realism memasukkan variabel eksternal dan internal dalam model mereka Sementara pergeseran kekuasaan di sistem internasional mendominasi, ancaman juga dapat berasal dari lingkungan subsistem atau regional dan domestik. Pada jurnalnya tersebut, Rose mendukung pernyataan bahwa terdapat tujuan rasional di dalam suatu pengambilan kebijakan luar negeri yang tidak dapat dipisahkan untuk

¹³ Gideon Rose, *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy* (London : Cambridge University Press), 1998

melihat faktor perilaku negara.. Para pemimpin juga dapat bertindak internasional untuk alasan domestik atau domestik untuk tujuan internasional. Ketiga, realis neoklasik menempatkan kekuasaan di pusat kehidupan politik.¹⁴

Neo classical realism menghadirkan konsepsi "*top-down*" tentang negara yang berarti kekuatan sistemik pada akhirnya mendorong perilaku eksternal. Teori ini memandang negara dilambangkan sebagai *national security executive*, yang terdiri dari kepala pemerintahan dan menteri serta pejabat yang ditugasi membuat kebijakan luar negeri. Para pemimpin mendefinisikan "kepentingan nasional" dan melakukan kebijakan luar negeri berdasarkan penilaian mereka atas kekuasaan relatif dan niat negara-negara lain, tetapi selalu tunduk pada faktor-faktor domestik. Sebaliknya, penilaian ancaman, penyesuaian strategis, dan implementasi kebijakan pada dasarnya sulit dan mungkin memerlukan perundingan yang cukup besar dalam kepemimpinan negara dan dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam masyarakat.¹⁵

Faktor-faktor pendorong dalam *Neo Classical Realism* adalah sistem yang mempengaruhi perilaku unit atau negara dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, yang dilihat berdasarkan tekanan yang didapat dari negara tersebut akibat dari adanya perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional (*Outside - In*), namun dalam teori ini perlu

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

disadari bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri tidak hanya dilihat dari faktor atau determinan eskternal saja dimana sistem internasional yang bersifat anarki merupakan faktor yang bersifat tidak langsung. Sehingga dalam teori ini, Gideon Rose kembali membawa analisis Realisme Klasik dengan pendekatan *inside – out*, yakni dengan melihat determinan domestik atau politik dalam negeri (innenpolitik) yang meliputi :

Pertama, ideologi sebagai ide dan prinsip yang digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menjustifikasi distribusi nilai dan sistem politik dalam penyelenggaraan negara yang memandu bagaimana seharusnya masyarakat bertindak dan pedoman dalam mengatur kekuasaan dalam suatu negara. Peran aktif dari masyarakat di negara demokrasi memiliki dampak yang penting dalam mengatur kekuasaan dalam suatu negara. Ideologi dari suatu negara berperan sebagai pedoman yang mengarahkan dan menegaskan konsistensi nagi negara untuk bertindak. Ideologi politik suatu negara lahir dari sejarah negara itu sendiri menjadi identitas politik suatu negara.¹⁶

Kedua, preferensi elit dan persepsi ancaman juga berperan penting dalam mempengaruhi arah kebijakan sebuah negara. Maksud dari preferensi tersebut adalah bagaimana para elit mengagagas ide dan nilai-nilai dalam menilai situasi dalam sistem internasional. Nilai-nilai dan ide yang digagas para elit dalam menilai situasi internasional menentukan kecenderungan perilaku yang akan berdampak pada perbedaan pendapat yang akan

¹⁶ Ibid.

ditunjukkan dalam proses pembuatan rekomendasi kebijakan luar negeri dalam lingkup pembuatan kebijakan luar negeri.

Ketiga, opini publik. Dalam negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, pemerintah perlu untuk mendengarkan dan menampung berbagai opini publik serta aspirasi masyarakat, perlu menanggapi pendapat yang ada dalam masyarakat baik yang menyangkut permasalahan domestik maupun preferensi elit dalam menanggapi isu-isu internasional yang akan memberikan dampak bagi politik internal. Masyarakat memiliki peran utama dan kekuatan terbesar keberlangsungan negaranya, Dengan peran yang dimiliki, masyarakat mempercayakan sebagian wewenang, legitimasi dan kedaulatannya kepada sebuah organisasi dalam hal ini yakni negara (*social construct*) untuk mencapai *order* yang kemudian menciptakan lima fungsi utama bagi negara yakni negara berfungsi dalam menyediakan rasa aman dan keamanan (*security*), untuk menjamin kebebasan (*freedom*), untuk menciptakan ketertiban (*order*) dan keadilan (*justice*), dan fungsi terakhir bagi negara adalah sebagai penyedia kesejahteraan (*welfare*). Melalui kepercayaan masyarakat pada negara untuk menjalankan kelima fungsi negara tersebut, hal ini menjadikan negara sebagai aktor satu-satunya yang memiliki legitimasi dan kedaulatan yang memberikan kapabilitas bagi negara untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan sebagai instrumen guna mempengaruhi entitas domestik maupun eksternal sebagai reaksi atau respon negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, menghadapi ancaman, memanfaatkan peluang untuk mendapatkan objektif dalam

kebijakannya dengan menggunakan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Apabila suatu negara melakukan penyelewengan atas legitimasi yang telah dipercayakan oleh masyarakat dengan tujuan-tujuan tersebut, maka rakyat dapat mengambil kembali legitimasi mereka dengan memutuskan kontrak sosial tersebut sehingga negara akan kehilangan legitimasi, wewenang dan kedaulatannya.¹⁷

Kekuatan material relatif dilihat sebagai kekuatan atau *power* yang dimiliki oleh suatu negara. Disebut relatif, karena kepemilikan *power* hanya bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring upaya negara dalam mempertahankan dan memaksimalkan kekuatan nasionalnya. Pengaruh yang dimaksudkan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara ialah apabila kekuatan nasional yang dimiliki sebuah negara berada pada taraf yang relatif besar maka negara akan cenderung melakukan hal apa saja yang diinginkannya untuk mempertahankan dan memperoleh *power*. Akan tetapi, preferensi tindakan yang diambil oleh negara dengan *power* yang relatif lebih rendah akan menjadi terbatas dalam interkasinya dalam sistem internasional.¹⁸

Melalui penjelasan diatas mengenai determinan domestik, pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dibuat oleh pemimpin negara beserta para elitnya, sehingga negara perlu mempertimbangkan faktor-faktor domestik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Determinan eksternal yang dimaksud adalah tekanan yang datang dari kondisi dalam sistem internasional seperti perubahan geopolitik suatu negara, tindakan yang dilakukan oleh aktor lain sebagai akibat dari interaksi antar negara yang membentuk sebuah pola ancaman, tantangan baru atau peluang bagi negara lain. Pola interaksi antar negara dapat membentuk dan menentukan pola maupun kondisi dalam sistem internasional, yakni kondisi anarki, kondisi kompetitif, kondisi yang aman berdasarkan balance of power dari kekuatan bipolar. Sehingga, dalam hal ini, arah kebijakan atau perilaku dari suatu negara akan disesuaikan dan ditentukan oleh tekanan yang datang dari kondisi di dalam sistem internasional sebagai akibat dari aksi dan reaksi suatu negara.¹⁹

Dalam ruang lingkungannya, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara juga didorong dan didasarkan oleh posisinya dalam sistem internasional dan kekuatan material relatif yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga melahirkan dan mendukung sebuah tujuan yang ingin dicapai melalui strategi yang tertuang dalam kebijakan luar negeri. Tindakan negara tentu berbeda apabila dilihat dari kapabilitas atau kekuatan material relatif dimana negara maju cenderung untuk terus melakukan apa yang menjadi kemampuannya dengan tujuan memperluas power atau kekuatan yang dimilikinya dan kebijakan luar negeri yang datang dari negara dengan kekuatan yang lemah hanya akan berfokus pada tujuan untuk bertahan hidup. Dalam menanggapi sebuah isu, pola perilaku negara yang

¹⁹ Ibid.

berdasarkan pada kekuatan relatif yang dapat mengarahkan negara pada tindakan untuk *rebalancing*.

Dengan demikian, analisa kebijakan berdasarkan kacamata *Neo Classical Realism* berfokus pada analisa yang melihat determinan yang dating dari internal negara yakni disebut sebagai *variable dependen* dan determinan eksternal yang merupakan *variable independen*.

Analisis mengenai kekuatan negara tidak hanya dilihat dari interaksinya dengan aktor lain di lingkungan eksternal namun juga melihat hubungan negara dengan masyarakatnya, karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada pembagian sumber daya nasional dan kepentingan nasional untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Teori *Neo Classical Realism* juga menjelaskan akan pentingnya kepentingan nasional dalam mengambil suatu kebijakan, dimana determinan domestik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teori ini. Sehingga, konsep yang digunakan ialah *national interest* atau kepentingan nasional yang dijelaskan dalam perspektif Realisme Klasik oleh Hans J. Morgenthau yang didefinisikan sebagai kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai *power* yang berusaha dicapai oleh negara-negara dalam interaksinya di politik internasional dimana politik ditetapkan sebagai arena perebutan kekuasaan (*struggle for power*). Kepentingan nasional merupakan sebuah instrumen dasar yang berfungsi sebagai penentu arah

tindakan politik / kebijakan suatu negara dimana kepentingan nasional tersebut akan membentuk pola hubungannya dengan negara lain, sehingga kepentingan nasional tentu menjadi penting sebagai bahan arah penentu kebijakan nasional.²⁰

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai macam material empiris berupa tulisan, gambar, sejarah, studi kasus yang kemudian membentuk pola yang akan menggambarkan kejadian atau permasalahan yang sedang dianalisis dan dijadikan sebuah kesimpulan. Penelitian dengan metode kualitatif lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variable yang saling terkait. Penulis juga menggunakan kategori penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena konflik yang terjadi di Ukraina, serta aktor-aktor yang terlibat, hingga faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat.²¹ Dalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan penelitian ini, maka

²⁰ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York : Mcgraw Hill Education), 2005

²¹ Umar Suryadi Bakry, *Metoda Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Pustaka belajar, 2016), 171-174

peneliti memilih teknik penulisan yakni melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah- masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang tengah dibahas serta pemanfaatan internet untuk mendapatkan data tertulis yang didokumentasikan.²²

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menyusun pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab II akan membahas mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Ukraina. Krisis atau Konflik Krimea dimana bab ini akan dibahas secara komprehensif kronologi dan sumber konflik Krimea di Ukraina yang berujung pada aneksasi Krimea oleh Rusia. Subbab pertama mendeskripsikan masalah secara komprehensif mengenai sejarah krisis Krimea, subbab kedua menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam krisis tersebut. Subbab ketiga

²² Umar Suryadi Bakry, *Metoda Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Pustaka belajar, 2016), 171-174

menjelaskan mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat. Subbab keempat menjelaskan mengenai tindakan Amerika Serikat dalam menanggapi aneksasi Krimea.

Bab III akan membahas analisis kebijakan luar negeri berupa sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Rusia terkait Aneksasi Krimea dengan menggunakan sudut pandang *Neo Classical Realism*, yang dibagi dalam sub bab pertama, analisis determinan domestik kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia, sub bab kedua analisis determinan internasional kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia, sub bab ketiga menjelaskan outcome atau dampak dari kebijakan sanksi ekonomi tersebut.

Bab IV penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dengan teori Neo Clasiccal Realism yang dijelaskan oleh Gideon Rose dalam jurnal *World Politics* pada Oktober 1998 sebagai landasan utama dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea.